

ABSTRAK

Yuni Triananda: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Terselenggaranya pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap warga negara. Seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Keberhasilan suatu Negara tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, akan tetapi di Indonesia sendiri masih ditemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Ditengah kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun, jumlah angka anak putus sekolah di Indonesia justru mengalami peningkatan pada tahun ajaran pendidikan 2022/2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan, untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam penurunan angka anak putus sekolah.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi sebagai acuan sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara sistematis hubungan antara permasalahan berdasarkan data akurat dan memberikan hasil mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum terkait implementasi hukum normatif secara *in action*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih adanya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Kendala pemerintah dalam penuntasan anak putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, faktor banyaknya masyarakat dari luar daerah Kabupaten Bekasi untuk menetap sehingga tidak terkontrolnya pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu memberikan pendidikan gratis, memberikan perlengkapan sekolah gratis, memberikan kesempatan bagi anak yang putus sekolah untuk melanjutkan kembali ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar disetiap Kecamatan, hingga bantuan operasional (BOS) kepada sekolah.

Kata Kunci: Anak Putus Sekolah, Implementasi, Penyelenggaraan Pendidikan.